

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2022



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MALAKA**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha atas anugerah-Nya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Sebagaimana ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ, adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Dalam kaitan dengan hal ini, bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malaka, memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi keterangan pertanggungjawaban, khususnya menyangkut lingkup pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Malaka selama Tahun Anggaran 2022.

Dalam LKPJ ini disampaikan berbagai aspek laporan pertanggungjawaban, mencakup penjelasan tugas pokok dan fungsi organisasi, pelaksanaan program/kegiatan, pendapatan, keberhasilan yang telah dicapai, serta hambatan-hambatan yang dijumpai dan upaya pemecahan masalahnya. LKPJ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban sebagaimana mestinya.

Demikian laporan ini dibuat, semoga laporan ini dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka untuk Tahun Anggaran 2022.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Malaka,

Yohanes Nahak, ST

Pembina Utama Muda

NIP. 19661231 200012 1 036

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Malaka 1

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA..... 9

2.1. Rencana Strategis Organisasi..... 9

2.1.1. Visi dan Misi..... 9

2.1.2. Tujuan dan Sasaran 10

2.1.3. Strategi dan Kebijakan..... 11

2.2. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 12

2.3. Penjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 17

3.1. Capaian Kinerja 17

3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja 21

3.3. Akuntabilitas Keuangan..... 23

BAB IV PENUTUP 28

4.1. Kesimpulan 28

4.2. Rekomendasi..... 28

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Dasar Hukum 1

1.2. Data Umum Daerah 2

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN APBD..... 17

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEKERJAAN UMUM 24

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan..... 24

 3.1.1. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 24

3.2. Kebijakan Strategis yang ditetapkan..... 37

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya 38

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
 PENUGASAN..... 40

BAB IV PENUTUP 41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
5. Peraturan Bupati Malaka Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Malaka
6. Peraturan Bupati Malaka Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka
7. Peraturan Bupati Malaka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2021 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malaka Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2022 Nomor 28)
8. Peraturan Bupati Malaka Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2022 Nomor 48)
9. Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : BPKPD.910/DPA/18/II/2022 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2022

10. Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : BPKPD.910/DPPA-P/17/XI/2022 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2022.

1.2. Data Umum Daerah

1.2.1. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka

A. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Bidang Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai uraian di atas dapat dikatakan bahwa sebagai salah satu pelaksana Pemerintah Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka mempunyai peranan yang cukup penting dan strategis dalam meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan sarana prasarana dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malaka yang berkelanjutan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020.

a. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah daerah.

b. Fungsi

Fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:

1. perumusan kebijakan bidang sumber daya air, bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang tata ruang dan bidang jasa konstruksi;
2. pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya air, bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang tata ruang dan bidang jasa konstruksi;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya air, bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang tata ruang dan bidang jasa konstruksi;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Lingkup Tugas

Lingkup tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didasarkan pada Peraturan Bupati Malaka Nomor 74 Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Bidang Tata Ruang

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pengendalian pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Tata Ruang. Lingkup Bidang Tata Ruang terdiri dari :

- a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang dengan tugas pokok menyiapkan bahan pengaturan, pemantauan, pengawasan teknis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang.

Uraian Tugas:

- 1) Melaksanakan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang di kabupaten;
- 2) Melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang di kabupaten;
- 3) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang di kabupaten;
- 4) Melaksanakan evaluasi dan monitoring Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang; dan

- 5) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b. Seksi Pengendalian Tata Ruang dengan tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan tata ruang.
Uraian Tugas:
 - 1) Menyusun dan penetapan ketentuan arahan peraturan zonasi system kabupaten;
 - 2) Menyusun dan penetapan perangkat insentif dan disinsentif serta pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang tingkat kabupaten;
 - 3) Menyusun dan penetapan ketentuan pemberian izin pemanfaatan ruang, serta pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang tingkat kabupaten;
 - 4) Menyusun dan penetapan ketentuan sanksi administratif, serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang tingkat kabupaten;
 - 5) Melaksanakan evaluasi dan monitoring Pengendalian Tata Ruang;
 - 6) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- c. Seksi Penertiban Tata Ruang dengan tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta melakukan koordinasi, evaluasi dan pelaporan.

Uraian Tugas:

- 1) Melaksanakan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- 2) Mengkoordinasi dan membina terhadap PPNS penataan ruang tingkat kabupaten;
- 3) Mengoperasionalisasikan PPNS penataan ruang tingkat kabupaten;
- 4) Melaksanakan evaluasi dan monitoring Penertiban Tata Ruang; dan
- 5) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Sumber Daya Air

Melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku yang menjadi urusan pemerintah kabupaten. Lingkup Bidang Sumber Daya Air terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air dengan tugas pokok melaksanakan kegiatan penetagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.

Uraian Tugas:

- 1) Menyusun pola pengelolaan sumber daya air;
- 2) Merencanakan teknis pengelolaan sumber daya air;
- 3) Menyusun program jangka menengah pengelolaan sumber daya air;
- 4) Menganalisis dan mengevaluasi kelayakan program dan pengelolaan system informasi dan data sumber daya air;
- 5) Memfasilitasi penerapan system manajemen mutu, menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- 6) Menganalisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran;
- 7) Menerapkan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- 8) Menyiapkan dan menyusun rencana dan dokumen pengadaan barang dan jasa;
- 9) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum;
- 10) Menyusun perjanjian kinerja dan laporan kinerja;
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- b. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air dengan tugas pokok menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan

konstruksi dan non konstruksi, persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi penerapan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Uraian Tugas:

- 1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik;
 - 2) Melaksanakan konstruksi dan non konstruksi sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku serta konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya, air tanah dan air baku yang menjadi urusan pemerintah kabupaten;
 - 3) Mempersiapkan penyerahan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan system manajemen mutu dan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
 - 4) Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi rawa, tambak air tanah dan air baku serta konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya, air tanah dan air baku yang menjadi urusan pemerintah kabupaten;
 - 5) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
 - 6) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan dengan tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan operasional dan pemeliharaan.

Uraian Tugas:

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan system manajemen mutu dan pengelolaan sistem hidrologi dan system peringatan dini;
- 2) Mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku;

- 3) Menyiapkan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan, penyelenggaraan alokasi air;
- 4) Menyiapkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan serta pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
- 5) Memfasilitasi penerapan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- 6) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan;
- 7) Memfasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten;
- 8) Melaksanakan evaluasi operasi dan pemeliharaan sumber daya air; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Bina Marga

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi di bidang teknis pengembangan prasarana transportasi jalan dan jembatan dalam kabupaten yang berstatus jalan dan jembatan kabupaten serta pengembangan prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU) dan taman sesuai dengan kewenangannya. Lingkup Bidang Bina Marga terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi dengan tugas pokok menyiapkan bahan untuk menyusun perencanaan teknis, pengumpulan data leger jalan dan jembatan, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan rencana pengembangan di bidang prasarana transportasi jalan dan jembatan serta PJU dan Taman.

Uraian Tugas:

- 1) Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta PJU dan Taman.

- 2) Melaksanakan koordinasi konektivitas system jaringan jalan dengan system moda transportasi bersama Pembina bidang ke-Bina Marga-an;
- 3) Melaksanakan pengolahan dan pengembangan system informasi jalan;
- 4) Melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana PJU;
- 5) Melaksanakan pembangunan dan peningkatan taman dalam kabupaten;
- 6) Melaksanakan evaluasi dan penetapan lebar jalan dan;
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan tugas pokok

melaksanakan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan, pengawasan pembinaan dan pengendalian jalan dan jembatan yang berstatus kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Uraian Tugas:

- 1) Melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- 2) Menyusun norma, standart, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
- 3) Melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan; dan
- 4) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan dengan tugas pokok melaksanakan pembinaan dan preservasi prasarana jalan dan jembatan di Bidang Bina Marga.

Uraian Tugas:

- 1) Mempreservasikan jalan dan jembatan;
- 2) Mengamankan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan jembatan;
- 3) Melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan pada pekerjaan preservasi; dan
- 4) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Cipta Karya

Melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis kabupaten dan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase lintas daerah, serta pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dan persampahan regional. Lingkup Bidang Cipta Karya terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian dengan tugas menyiapkan bahan untuk menyusun rencana dan program cipta karya, pengendalian, pembinaan, pengumpulan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan keciptakarya.

Uraian Tugas:

- 1) Menyusun program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya;
- 2) Mengsinkronisasikan program – program keciptakarya;
- 3) Melaksanakan fasilitasi kepada pemerintah daerah (kecamatan/ kabupaten) dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program;
- 4) Melaksanakan penyusunan RPI2JM bidang cipta karya tingkat kabupaten;
- 5) Melaksanakan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan;
- 6) Melaksanakan evaluasi dan monitoring perencanaan infrastuktur cipta karya; dan
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- b. Seksi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dengan tugas pokok menyiapkan bahan untuk melaksanakan pengaturan teknis, pengendalian pengembangan kawasan permukiman dan penyehatan lingkungan permukiman.

Uraian Tugas:

- 1) Mengembangkan system persampahan regional;
- 2) Mengelola dan mengembangkan system air limbah domestik dan regional;
- 3) Mengelola dan pengembangan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah;

- 4) Menyelenggarakan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
 - 5) Melaksanakan evaluasi dan monitoring penataan pengembangan kawasan permukiman dan penyehatan lingkungan permukiman;
 - 6) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- c. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dengan tugas pokok melakukan penyiapan bahan untuk melaksanakan pengaturan, pengendalian, pembinaan, penyusunan rencana penataan bangunan, permukiman di kawasan strategis.

Uraian Tugas:

- 1) Menyelenggarakan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
- 2) Menetapkan bangunan gedung untuk kepentingan strategis kabupaten;
- 3) Menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis;
- 4) Menata bangunan dan lingkungannya lintas kecamatan;
- 5) Melaksanakan evaluasi dan monitoring penataan bangunan; dan
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Jasa Konstruksi

Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lingkup Bidang Jasa Konstruksi terdiri dari:

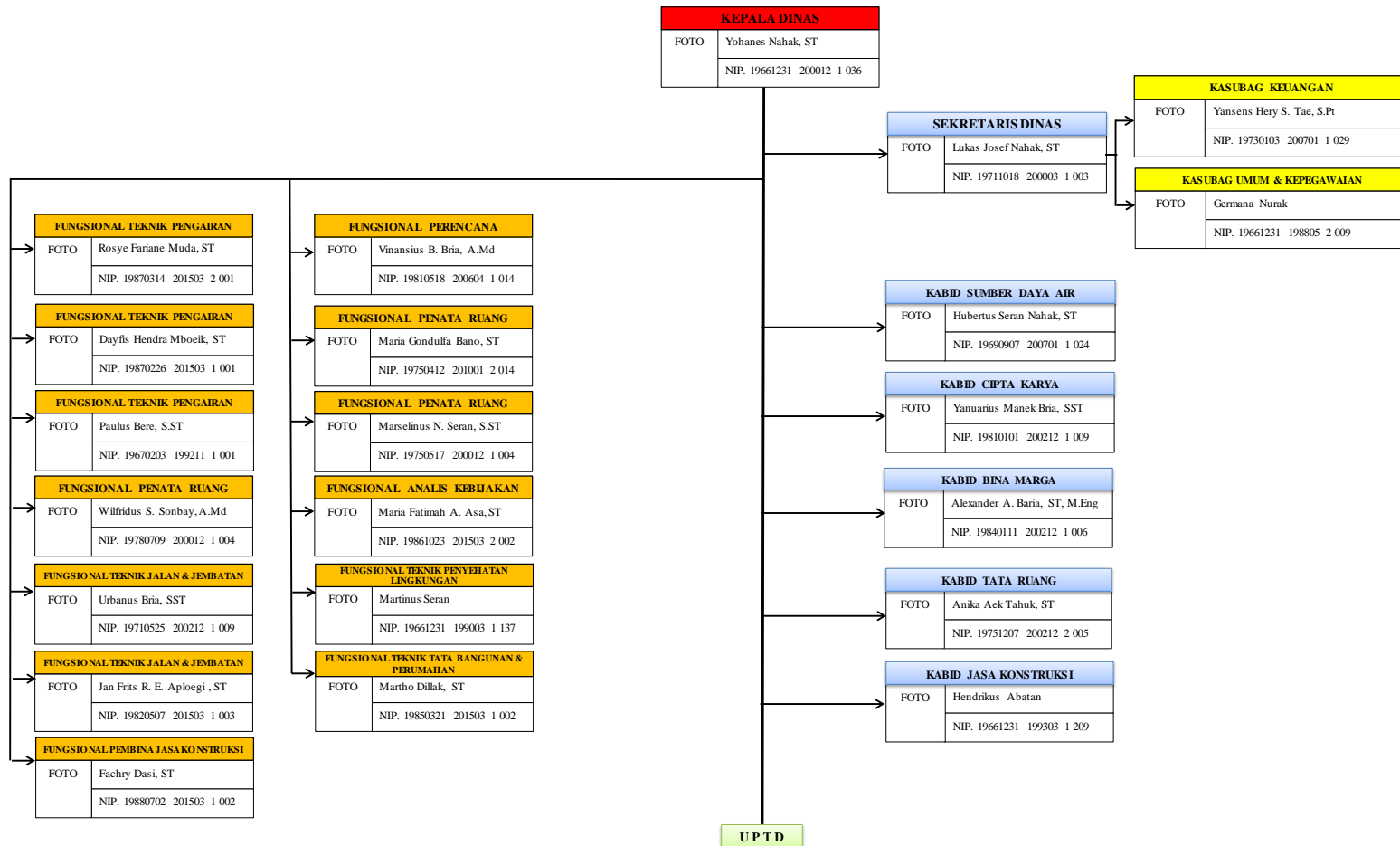
- a. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi dengan tugas menyiapkan bahan pengaturan, pembinaan, koordinasi, administrasi, pelayanan teknis dan pelaporan.

Uraian Tugas:

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria jasa konstruksi;
- 2) Menyebarkan peraturan dan penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan di bidang jasa konstruksi;

- 3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring pengaturan jasa konstruksi; dan
 - 4) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi dengan tugas menyiapkan bahan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dan pemberdayaan jasa konstruksi.
- Uraian Tugas:
- 1) Menyiapkan bahan pembinaan, pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi;
 - 2) Menyelenggarakan system informasi jasa konstruksi;
 - 3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring pemberdayaan jasa konstruksi; dan
 - 4) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- c. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi dengan melaksanakan pemantauan dan pengawasan pemanfaatan, tertib usaha, tertib penyelenggara jasa konstruksi.
- Uraian Tugas:
- 1) Memantau dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
 - 2) Menyiapkan harga satuan bahan bangunan dan satuan harga per triwulan tahun anggaran di tingkat kabupaten;
 - 3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring pengawasan jasa konstruksi; dan
 - 4) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

d. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malaka



1.2.2. Jumlah PNS

Secara keseluruhan jumlah pegawai yang bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka per 31 Desember 2022 sebanyak 77 orang yang terdiri dari 67 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 orang Tenaga Kontrak Daerah (TEDA).

A. Jumlah PNS menurut pendidikan

PENDIDIKAN	PNS	P3K	TENAGA KONTRAK
S3			
S2	2		
S1	42		4
D4			
D3	9		
SLTA	13		6
SLTP	1		
SD			
JUMLAH	67	0	10

B. Jumlah PNS menurut Pangkat dan Golongan :

PANGKAT	GOLOGAN	RUANG	PNS
JURU MUDA	I	A	0
JURU MUDA TINGKAT I	I	B	0
JURU	I	C	0
JURU TINGKAT I	I	D	0
PENGATUR MUDA	II	A	2
PENGATUR MUDA TINGKAT I	II	B	1
PENGATUR	II	C	6
PENGATUR TINGKAT I	II	D	8
PENATA MUDA	III	A	27
PENATA MUDA TINGKAT I	III	B	3
PENATA	III	C	12
PENATA TINGKAT I	III	D	6
PEMBINA	IV	A	1
PEMBINA TINGKAT I	IV	B	0
PEMBINA UTAMA MUDA	IV	C	1
PEMBINA UTAMA MADYA	IV	D	0
PEMBINA UTAMA	IV	E	0
JUMLAH			67

C. Jumlah PNS menurut jabatan :

JABATAN	PNS
KEPALA DINAS	1
SEKRETARIS DINAS	1
KEPALA BIDANG	5
KASUBAG	2
JABATAN FUNGSIONAL	13

Jumlah tenaga kontrak daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka adalah sebanyak 10 Orang dengan rincian pendidikan terakhir Strata 1 sebanyak 4 orang dan Pendidikan terakhir SLTA sebanyak 6 orang.

a) Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jumlah pegawai pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2022 sebanyak 77 orang yang terdiri dari 67 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 orang Tenaga Kontrak Daerah (TEDA) dengan rincian pendidikan Pegawai Negeri Sipil yaitu Strata 2 (S2) sebanyak 2 orang, Strata 1 (S1) sebanyak 42, Diploma sebanyak 9 orang, SLTA sebanyak 13 orang dan SLTP sebanyak 1 orang dan rincian pendidikan Tenaga Kontrak Daerah (TEDA) yaitu pendidikan terakhir Strata 1 sebanyak 4 orang dan Pendidikan terakhir SLTA sebanyak 6 orang.

Selain sumber daya manusia sebagai pendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka didukung oleh ketersediaan sarana yang memadai seperti terlihat pada tabel berikut ini :

No	Nama / Jenis Barang	Jumlah Barang (Unit)	Kondisi Barang
Alat-Alat Besar			
1	Alat Potong Rumput	44	34 Baik, 10 Rusak Ringan
2	Tong Sampah	176	24 Baik, 146 Rusak Berat
3	Tong Sampah Besar Beroda Fiber	30	Rusak Berat
4	Container	1	Rusak Ringan
5	Meteran Listrik	2	Baik
Alat-Alat Angkutan			
1	Station Wagon	7	6 Baik, 1 Rusak Ringan
2	Dump Truck	1	Baik
3	Truck Sampah	1	Baik
4	Sepeda Motor	25	23 Baik, 2 Rusak Berat
5	Motor Roda 3	6	1 Baik, 5 Rusak Berat
Alat-Alat Studio dan Komunikasi			
1	Infokus	2	1 Baik, 1 Rusak Ringan
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
1	Lemari Arsip	9	Baik
2	Lemari Arsip 2 Pintu	2	Baik
3	Kursi Besi (Stainles)	40	Baik
4	Kursi Kerja /Kayu	5	Baik
5	Kursi Plastik Lurus	70	Baik
6	Meja 1/2 Biro	59	Baik
7	Alat Pendingin AC	6	2 Baik, 4 Rusak Ringan
8	UPS	2	Baik
9	Komputer PC	8	4 Baik, 4 Rusak Ringan
10	Laptop	20	17 Baik, 2 Rusak Ringan, 1 Rusak Berat
11	Scanner	5	Baik
12	Printer A3	8	5 Baik, 3 Rusak Ringan
13	Printer Mini	1	Rusak Ringan
14	Printer F4	16	14 Baik, 2 Rusak Ringan
15	Hardisk	3	2 Baik, 1 Rusak Ringan
16	Meja Kerja Pejabat	2	Baik
17	Meja Biro	1	Baik
18	Kursi Pimpinan/Direktur	1	Baik

1.2.3. Realisasi Pendapatan menurut jenis pendapatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka per 31 Desember 2022 memiliki pendapatan sebagai berikut:

Target : Rp. 125.000.000,-

Realisasi : Rp. 126.635.000 atau 101,31%

Pendapatan 2022		
Pagu	Realisasi	%
Rp. 125.000.000,-	Rp. 126.635.000,-	101,31

1.2.4. Realisasi belanja menurut jenis belanja

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka sampai dengan 31 Desember 2022 secara umum dapat terlaksana dengan baik. Pencapaian kinerja pada program dan kegiatan yang telah dilaksanakan secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	Belanja Operasi		10.528.474.291	9.678.247.283	91,92%
	-	Belanja Pegawai	4.798.730.426	4.329.581.508	90,22%
	-	Belanja Barang dan Jasa	5.729.743.865	5.348.665.775	93,35%
2	Belanja Modal		72.738.248.417	66.145.436.170	90,94%
	-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.316.770	56.316.770	100,00%
	-	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.306.000.000	28.209.516.734	99,66%
	-	Belanja Modal Jalan	32.995.066.007	27.664.306.072	83,84%
	-	Belanja Modal Jaringan dan Irigasi	11.380.865.640	10.215.296.594	89,76%
	TOTAL BELANJA		83.266.722.708	75.823.683.453	91,06%

1.2.5. Realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan

Dinas PUPR tidak memiliki pembiayaan

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	Keterangan Alasan Bertambah/Berkurang	REALISASI	%
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7		
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. MALAKA			68.626.824.683	83.266.722.708	12.516.037.225		75.823.683.453	91,06%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		31.671.754.653	34.214.089.096	418.473.643		33.643.891.961	98,33%
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.632.149.883	4.698.450.426	66.300.543		4.233.101.508	90,10%
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.460.329.883	4.445.630.426	-14.699.457	Pengurangan sebesar Rp. 14.699.457 karena adanya pengurangan Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	3.983.401.508	89,60%
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	171.820.000	252.820.000	81.000.000	Penambahan sebesar Rp. 81.000.000 untuk belanja perjalanan dinas (transportasi dan akomodasi) tim pendampingan hukum paket pekerjaan konstruksi pada dinas pupr kab malaka	249.700.000	98,77%

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	Keterangan Alasan Bertambah/Berkurang	REALISASI	%
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)			
1			2	3	4	5	6	7
	B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	198.000.000	160.500.000	-37.500.000		160.500.000	100,00%
		1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	198.000.000	160.500.000	-37.500.000	Pengurangan sebesar Rp. 37.500.000 karena adanya pengurangan tenaga kontrak daerah di lingkup dinas pupr	160.500.000	100,00%
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	182.380.245	547.034.745	364.654.500		546.930.750	99,98%
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.955.625	1.955.625	0		1.953.750	99,90%
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.750.000	3.750.000	0		3.750.000	100,00%
		3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.957.620	60.957.620	4.000.000	Penambahan sebesar Rp. 4.000.000 untuk belanja alat tulis kantor	60.948.000	99,98%
		4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.066.000	18.903.500	1.837.500	Penambahan sebesar Rp. 1.837.500 untuk belanja fotocopy dan jilid	18.903.500	100,00%
		5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.651.000	461.468.000	358.817.000	Penambahan sebesar Rp. 358.817.000 untuk rapat koordinasi dan konsultasi terkait DAK TA 2023	461.375.500	99,98%
	D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.310.090.000	28.433.950.800			28.330.033.734	99,63%

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	Keterangan Alasan Bertambah/Berkurang	REALISASI	%
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)			
1				2	3	4	5	6	7
		1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.310.090.000	28.433.950.800	2.123.860.800	Penambahan sebesar Rp. 2.123.860.800 untuk paket pekerjaan pembangunan gedung kantor DPRD Kab Malaka	28.330.033.734	99,63%
	E		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.560.000	60.580.000	16.020.000		59.752.844	98,63%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	13.000.000	3.000.000	Penambahan sebesar Rp. 3.000.000 untuk belanja meterai	13.000.000	100,00%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.560.000	47.580.000	13.020.000	Penambahan sebesar Rp. 13.020.000 untuk belanja pulsa listrik gedung kantor DPRD Kab Malaka	46.752.844	98,26%
	F		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	304.574.525	313.573.125	8.998.600		313.573.125	100,00%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	303.436.000	312.434.600	8.998.600	Penambahan Sebesar Rp. 8.998.600 untuk Pemeliharaan (Suku Cadang dan BBM) Genzet Lapangan Umum Betun	312.434.600	100,00%

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	Keterangan Alasan Bertambah/Berkurang	REALISASI	%
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)			
1				2	3	4	5	6	7
		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.138.525	1.138.525	0		1.138.525	100,00%
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			2.632.929.030	3.409.307.171	776.378.141		2.943.704.155	86,34%
	A	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		120.000.000	894.888.205	774.888.205		874.675.686	97,74%
		1	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	120.000.000	121.940.000	1.940.000	Penambahan sebesar Rp. 1.940.000 untuk belanja penunjang pembangunan embung	121.662.781	99,77%
		2	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	0	772.948.205	772.948.205	Penambahan sebesar Rp. 772.948.205 untuk paket pekerjaan luncuran (DPAL) TA 2021	753.012.905	97,42%
	B	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		2.512.929.030	2.514.418.966	1.489.936		2.069.028.469	82,29%
		1	Rehabilitasi Jaringan	2.512.929.030	2.514.418.966	1.489.936	Penambahan sebesar Rp.	2.069.028.469	82,29%

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	Keterangan Alasan Bertambah/Berkurang	REALISASI	%
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)			
1				2	3	4	5	6	7
			Irigasi Permukaan				1.489.936 untuk belanja penunjang konstruksi irigasi		
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			8.383.625.000	8.642.622.639	258.997.639		7.921.179.409	91,65%
	A	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		8.383.625.000	8.642.622.639	258.997.639		7.921.179.409	91,65%
		1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	8.383.625.000	8.642.622.639	258.997.639	Penambahan sebesar Rp. 258.997.639 untuk paket pekerjaan luncuran (DPAL) TA 2021 dan penambahan paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan teknis pembangunan jaringan perpipaan tahun 2023	7.921.179.409	91,65%
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			701.500.000	2.083.859.017	1.382.359.017		1.791.163.990	85,95%
	A	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		701.500.000	2.083.859.017	1.382.359.017		1.791.163.990	85,95%
		1	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	701.500.000	2.083.859.017	1.382.359.017	Penambahan sebesar Rp. 1.382.359.017 untuk paket pekerjaan luncuran	1.791.163.990	85,95%

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	Keterangan Alasan Bertambah/Berkurang	REALISASI	%
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)			
1				2	3	4	5	6	7
							(DPAL) TA 2021		
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			25.146.196.000	34.798.590.885	9.652.394.885		29.406.447.038	84,50%
	A	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		25.146.196.000	34.798.590.885	9.652.394.885		29.406.447.038	84,50%
		1	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	0	434.880.000	434.880.000	Penambahan sebesar Rp. 434.880.000 untuk Jasa Konsultansi Penilai Aset (Jasa Appraisal) Pengadaan Tanah Jalan Masuk Kantor Bupati Malaka dan belanja penunjang lainnya	432.781.900	99,52%
		2	Pembangunan Jalan	24.896.496.000	34.052.850.841	9.156.354.841	Penambahan Rp. 9.156.354.841 untuk Paket Pekerjaan Luncuran TA 2021 sebesar Rp. 2.574.888.888 dan Penambahan Paket Pekerjaan sumber dana DAK	28.721.522.466	84,34%
		3	Pemeliharaan Rutin Jalan	249.700.000	310.860.044	61.160.044	Penambahan Rp. 61.160.044 untuk Paket Pekerjaan Luncuran TA 2021	252.142.672	81,11%
6	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			53.490.000	65.623.900	12.133.900		64.666.900	98,54%
	A	Pengawasan Tertib		53.490.000	65.623.900	12.133.900		64.666.900	98,54%

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	Keterangan Alasan Bertambah/Berkurang	REALISASI	%
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)			
1			2	3	4	5	6	7
		Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						
	1	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	53.490.000	65.623.900	12.133.900	Penambahan Sebesar Rp. 12.133.900 untuk belanja komponen peralatan pengujian konstruksi jalan	64.666.900	98,54%
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		37.330.000	52.630.000	15.300.000		52.630.000	100,00%
	A	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	37.330.000	52.630.000	15.300.000		52.630.000	100,00%
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	37.330.000	52.630.000	15.300.000	Penambahan Sebesar Rp. 15.300.000 untuk belanja perjalanan dinas dalam daerah	52.630.000	100,00%

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.1.1. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Kebijakan	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.214.089.096	33.643.891.961	98,33%			
		A Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
		TOTAL PAGU	4.698.450.426					
		TOTAL REALISASI	4.233.101.508					
		PENCAPAIAN	90,10%					
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pagu 4.445.630.426	Realisasi	3.983.401.508			
			TARGET:	Ach	89,60%			
			Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output	Tersedianya anggaran pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan ASN			
				Outcoume	Meningkatkan kinerja pelayanan urusan pemerintahan			
				Immediate Outcome	Lancarnya kegiatan pada Dinas PUPR			
		2 Penyediaan Administrasi	Pagu 252.820.000	Realisasi	249.700.000			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan		Pagu		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	
				Pelaksanaan Tugas ASN	TARGET:	Ach	98,77%				
					Terlaksananya penyediaan jasa administrasi pengelola keuangan	Output	Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan yang berkualitas				
						Outcoume	Meningkatkan Pelayanan Administrasi perkantoran				
						Immediate Outcome	Kegiatan Kantor dapat berjalan dengan baik dan lancar				
		B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
			TOTAL PAGU		160.500.000						
			TOTAL REALISASI		160.500.000						
			PENCAPAIAN		100,00%						
			1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pagu	160.500.000	Realisasi	160.500.000			
		TARGET:			Ach	100,00%					
		Terlaksananya penyediaan jasa pengolahan administrasi kepegawaian			Output	Terbayarnya Honorarium Tenaga Kontrak Daerah Lingkup Dinas PUPR					
					Outcoume	Pelayanan Administrasi perkantoran dapat berjalan dengan baik					
					Immediate Outcome	Lancarnya kegiatan pada Dinas PUPR					
		C	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
			TOTAL PAGU		547.034.745						
			TOTAL REALISASI		546.930.750						
			PENCAPAIAN		99,98%						
			1	Penyediaan Komponen Instalasi	Pagu	1.955.625	Realisasi	1.953.750			
		TARGET:			Ach	99,90%					

No	Kebijakan	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen instalasi Listrik	Output	Terpenuhinya kebutuhan alat listrik untuk menunjang aktivitas di kantor		
					Outcoume	Terwujudnya kondisi kantor yang baik dan nyaman		
					Immediate Outcome	Meningkatnya kinerja pelayanan urusan pemerintahan		
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pagu 3.750.000	Realisasi	3.750.000		
				TARGET:	Ach	100,00%		
			Terpeliharanya peralatan kerja yang ada	Output	Terlaksananya penyediaan jasa peralatan kerja			
				Outcoume	Terwujudnya kegiatan kantor yang baik dan lancar			
				Immediate Outcome	Meningkatnya kinerja pelayanan urusan pemerintahan			
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pagu 60.957.620	Realisasi	60.948.000		
				TARGET:	Ach	99,98%		
			Ketersediaan alat tulis kantor	Output	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor			
				Outcoume	Terwujudnya kegiatan kantor dengan baik dan lancar			
				Immediate Outcome	Meningkatnya kinerja pelayanan urusan pemerintahan			
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pagu 18.903.500	Realisasi	18.903.500		
				TARGET:	Ach	100,00%		

No	Kebijakan	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Output	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebagai bahan penunjang pelaksanaan administrasi perkantoran			
				Outcoume	Terwujudnya pelayanan perkantoran yang baik dan lancar			
				Immediate Outcome	Meningkatnya kinerja pelayanan urusan pemerintahan			
		5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pagu 461.468.000	Realisasi	461.375.500			
			TARGET:	Ach	99,98%			
			Tersedianya penyelenggaraan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Output	Optimalisasi pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran			
				Outcoume	Terkoordinasikannya permasalahan yang berkaitan dengan Dinas melalui rapat-rapat dan konsultasi			
				Immediate Outcome	Meningkatnya kinerja pelayanan urusan pemerintahan			
		D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
			TOTAL PAGU	28.433.950.800				
			TOTAL REALISASI	28.330.033.734				
			PENCAPAIAN	99,63%				
		1 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pagu 28.433.950.800	Realisasi	28.330.033.734			
			TARGET:	Ach	99,63%			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan		Pagu	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	Output	Tersedianya bangunan Gedung Kantor (Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kab Malaka (Nilai kontrak Rp. 6.713.255.164,48,- dan Pembangunan Gedung Kantor Bupati Malaka Tahap I (Nilai Kontrak : Rp. 94.590.000.000)			
					Outcoume	Memperlancar pelaksanaan tugas dinas			
					Immediate Outcome	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan			
		E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			TOTAL PAGU		60.580.000				
			TOTAL REALISASI		59.752.844				
			PENCAPAIAN		98,63%				
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pagu	13.000.000	Realisasi	13.000.000		
				TARGET:		Ach	100,00%		
				Lancarnya kegiatan surat menyurat	Output	Terlaksananya kegiatan surat menyurat			
					Outcoume	Pelayanan Administrasi perkantoran dalam kegiatan surat menyurat berjalan dengan baik dan lancar			
					Immediate Outcome	Lancarnya kegiatan pada Dinas PUPR			
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Pagu	47.580.000	Realisasi	46.752.844		
				TARGET:		Ach	98,26%		

No	Kebijakan	Program/Kegiatan		Pagu	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD		
				Air dan Listrik	Ketersediaan Jasa komunikasi, air dan listrik	Output	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya listrik dan air				
						Outcoume	Pelayanan Administrasi perkantoran dapat berjalan dengan baik dan lancar				
						Immediate Outcome	Lancarnya kegiatan pada Dinas PUPR				
		F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
		TOTAL PAGU				313.573.125					
		TOTAL REALISASI				313.573.125					
		PENCAPAIAN				100,00%					
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pagu	312.434.600	Realisasi	312.434.600				
				TARGET:		Ach	100,00%				
				Ketersediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Output	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional yang siap pakai					
					Outcoume	Memperlancar dalam pelaksanaan tugas dinas					
					Immediate Outcome	Lancarnya kegiatan pada Dinas PUPR					
		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pagu	1.138.525	Realisasi	1.138.525				
				TARGET:		Ach	100,00%				
				Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	Output	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Terlaksananya Penyediaan Jasa kebersihan kantor					
					Outcoume	Terwujudnya kegiatan kantor dengan baik dan lancar					

No	Kebijakan	Program/Kegiatan		Pagu	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Immediate Outcome	Meningkatnya kinerja pelayanan urusan pemerintahan			
2		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		3.409.307.171	2.943.704.155	86,34%			
		A Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
		TOTAL PAGU		894.888.205					
		TOTAL REALISASI		874.675.686					
		PENCAPAIAN		97,74%					
		1 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Pagu	121.940.000	Realisasi	121.662.781			
			TARGET:		Ach	99,77%			
			Terlaksananya pembangunan embung		Output	Terpeliharanya embung arena pacuan kuda di desa Tniumanu (Nilai Kontrak : Rp. 119.722.781,-)			
					Outcoume	Masyarakat desa tinumanu dapat menikmati fasilitas embung yang telah direhab			
					Immediate Outcome	Terwujudnya ketersediaan pasokan air untuk keperluan tanaman ataupun ternak dimusim kemarau dan mencegah banjir dimusim penghujan			
		2 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Pagu	772.948.205	Realisasi	753.012.905			
			TARGET:		Ach	97,42%			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan		Pagu	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Membangun dan merehab prasarana pengendalian banjir	Output	Terlaksananya pembayaran paket pekerjaan luncuran tahun anggaran 2021 yaitu paket pekerjaan perkuatan Tebing Sungai di Desa Angkaes dan Desa Wederok			
					Outcoume	Terealisasinya pembayaran yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab Pemda			
					Immediate Outcome	Berkurangnya utang belanja Pemda kepada penyedia			
		B Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
		TOTAL PAGU		2.514.418.966					
		TOTAL REALISASI		2.069.028.469					
		PENCAPAIAN		82,29%					
		1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Pagu 2.514.418.966	Realisasi	2.069.028.469			
				TARGET:	Ach	82,29%			
				Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Output	Tersedianya Saluran Permanen untuk Menyalurkan Air ke Lahan Pertanian secara Berkesinambungan. Tahun 2022 terdapat 1 paket pekerjaan pada kegiatan ini yaitu rehabilitasi jaringan irigasi DI Eturaifou (71 Ha) (Nilai Kontrak : Rp. 1.901.088.937,-)			
					Outcoume	Jaringan irigasi yang dibangun dapat menyalurkan air ke Lahan Pertanian Masyarakat			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Immediate Outcome	Terbangunnya Jaringan Irigasi			
3		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	8.642.622.639	7.921.179.409	91,65%			
		A Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						
		TOTAL PAGU	8.642.622.639					
		TOTAL REALISASI	7.921.179.409					
		PENCAPAIAN	91,65%					
		1 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pagu 8.642.622.639	Realisasi	7.921.179.409			
			TARGET:	Ach	91,65%			
			Terlaksananya Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	Output	Terbangunnya SPAM jaringan perpipaan yang optimal untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat. Desa yang mendapat kegiatan pembangunan Jaringan Air bersih adalah Desa Wehali, Kamanasa, Kateri dan Desa kereana			
				Outcoume	Masyarakat di Desa tersebut dapat menikmati air bersih			
				Immediate Outcome	Meningkatnya jaringan air minum untuk masyarakat			
4		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.083.859.017	1.791.163.990	85,95%			
		A Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						
		TOTAL PAGU	2.083.859.017					
		TOTAL REALISASI	1.791.163.990					

No	Kebijakan	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		PENCAPAIAN	85,95%					
		1 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pagu 2.083.859.017	Realisasi	1.791.163.990			
			TARGET:	Ach	85,95%			
			Terbangunnya sarana/prasarana Sanitasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Output	Terbangunnya sarana/prasarana Sanitasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebanyak 95 unit septik tank di desa umutnana			
				Outcoume	Meningkatnya jumlah masyarakat yang menikmati Sanitasi			
				Immediate Outcome	Masyarakat dapat menikmati lingkungan yang bersih dan sehat			
5		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	34.798.590.885	29.406.447.038	84,50%			
		A Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						
		TOTAL PAGU	34.798.590.885					
		TOTAL REALISASI	29.406.447.038					
		PENCAPAIAN	84,50%					
		1 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Pagu 434.880.000	Realisasi	432.781.900			
			TARGET:	Ach	99,52%			
			Tersedianya dokumen terkait nilai ganti rugi lahan untuk pembangunan jalan	Output	Tersedianya data nilai ganti rugi pembebasan tanah rakyat untuk kepentingan pemerintah/umum			
				Outcoume	Dengan adanya nilai ganti rugi lahan dan bangunan maka pemerintah dapat mengalokasikan anggaran ganti rugi sesuai dengan dokumen yang ada			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan		Pagu	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Immediate Outcome	Proses pembangunan jalan menuju kantor Bupati Malaka dapat segera di kerjakan			
		2	Pembangunan Jalan	Pagu 34.052.850.841	Realisasi	28.721.522.466			
				TARGET:	Ach	84,34%			
				Terlaksananya pembangunan jalan	Output	- Panjang pembangunan/peningkatan Jalan Kabupaten adalah 4944 m - Panjang pembangunan/peningkatan Jalan Desa adalah 10364 meter - Panjang pembangunan/peningkatan Jalan Lingkungan adalah 4055 meter - Tersedianya 4 Dokumen perencanaan Jalan			
					Outcome	Mengurangi resiko kecelakaan pengguna jalan dan jembatan, mempercepat waktu dan memperpendek jarak tempuh			
					Immediate Outcome	Memantapkan kondisi jalan/jembatan			
		3	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pagu 310.860.044	Realisasi	252.142.672			
				TARGET:	Ach	81,11%			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan		Pagu	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Terlaksananya pemeliharaan jalan di ruas jalan kabupaten malaka	Output	Terlaksananya pembangunan Tembok penahan jalan di desa rainawe dan dusun molos oan			
					Outcoume	Mengurangi resiko kecelakaan pengguna jalan dan jembatan, mempercepat waktu dan memperpendek jarak tempuh			
					Immediate Outcome	Memantapkan kondisi jalan/jembatan			
6		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		65.623.900	64.666.900	98,54%			
		A	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						
			TOTAL PAGU	65.623.900					
			TOTAL REALISASI	64.666.900					
			PENCAPAIAN	98,54%					
		1	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pagu 65.623.900	Realisasi	64.666.900			
				TARGET:	Ach	98,54%			
				Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi pekerjaan konstruksi	Output	- Jumlah paket pekerjaan konstruksi yang dimonitoring dan evaluasi sebanyak 22 paket pekerjaan - Jumlah paket pekerjaan konstruksi yang dilakukan pengujian laboratorium sebanyak 7 paket pekerjaan			

No	Kebijakan	Program/Kegiatan		Pagu	Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Outcoume	Manfaat dari kegiatan ini adalah hasil komstruksi yang dibangun mempunyai kualitas mutu yang baik karena adanya pengawasan dan evaluasi terhadap konstruksi yang dikerjakan			
					Immediate Outcome	Meningkatkan pengawasan dan evaluasi konstruksi pekerjaan			
7		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		52.630.000	52.630.000	100,00%			
		A	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						
			TOTAL PAGU	52.630.000					
			TOTAL REALISASI	52.630.000					
			PENCAPAIAN	100,00%					
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Pagu	52.630.000	Realisasi	52.630.000		
				TARGET:		Ach	100,00%		
				Meningkatnya Koordinasi Pemanfaatan Ruang Kab Malaka	Output	Terlaksananya Penerbitan Surat Keterangan Rencana Kabupaten tentang Pemanfaatan Ruang			
					Outcoume	Mewujudkan tertib tata ruang agar pemanfaatan yang dilakukan sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah			
					Immediate Outcome	Lingkungan tertata dengan baik			

3.2. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Tidak ada kebijakan strategis

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut di Tahun 2022	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Proyek pembangunan septik tank yang tersebar di 5 (lima) desa yaitu, desa Wekmurak dan Tafuli I Kecamatan Rinhat, Desa Raimataus Kecamatan Malaka Barat, Desa Wederok Kecamatan Weliman dan Desa Kereana Kecamatan Babotin Leobebe di Kabupaten Malaka perlu mendapat perhatian serius dari OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pansus DPRD Kabupaten Malaka secara tegas mengingatkan kepada Kontraktor yang mengelola proyek pembangunan ini untuk tidak boleh diikutsertakan lagi dalam pekerjaan-pekerjaan proyek fisik di Kabupaten Malaka dan OPD pengelola proyek pembangunan ini harus memberikan teguran keras kepada pihak pengelola proyek pembangunan sebagaimana dimaksud. Pansus DPRD Kabupaten Malaka meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk melakukan pengawasan yang intensif agar sisa pekerjaan ini bisa diselesaikan dalam waktu 30 hari terhitung sejak penyerahan rekomendasi ini	Pada Tahun Anggaran 2022, empat dari lima proyek septik tank telah selesai dikerjakan dan Dinas PUPR telah melakukan pembayaran kepada penyedia. 4 (Empat) Proyek pembangunan septik tank yang telah selesai adalah pembangunan septik tank di desa kereana, desa raimataus, desa wederok dan desa wekmurak. Sedangkan satu proyek pembangunan septik tank yang belum selesai adalah pembangunan septik tank di desa tafuli I karena ada pemindahan lokasi pekerjaan oleh karena lokasi yang sebelumnya terjadi longsor sehingga terkendala pada proses pendistribusian materia lokal maupun nonlokal. Dinas akan lebih ketat dalam melakukan monitoring dan pengawasan terhadap paket pekerjaan ini agar dapat selesai secepatnya	Proyek pembangunan septik tank yang tersebar di 4 (empat) desa telah selesai dikerjakan dan masyarakat sudah bisa menikmati septik tank yang telah dibangun

No	Perangkat Daerah	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut di Tahun 2022	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		2. Pansus DPRD Kabupaten Malaka meminta supaya proyek pengerjaan jaringan perpipaan di Desa Nanin dan Desa Niti Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka segera diselesaikan dalam bulan Mei Tahun 2022 ini.	Pada tanggal 21 Januari 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Malaka telah melakukan PHO terhadap Paket Pekerjaan Jaringan Perpipaan di Desa Niti dan pada tanggal 30 Desember 2022 telah dilakukan pembayaran terhadap penyedia. Kemudian untuk paket pekerjaan jaringan perpipaan di Desa Nanin belum selesai dikerjakan karena kelalaian dari pelaksana (kontraktor) dalam proses pengerjaan sehingga waktu penyelesaian pekerjaan melampaui jadwal pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak. Dinas akan lebih ketat dalam melakukan monitoring dan pengawasan terhadap paket pekerjaan ini agar dapat selesai secepatnya	Proyek Pembangunan septik di Desa Niti telah selesai dikerjakan dan masyarakat di desa tersebut telah terlayani air bersih.

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

Dinas PUPR tidak ada tugas pembantuan.


BAB V

PENUTUP

Dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Perangkat Daerah (LKPJ – PD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2022 dapat diambil kesimpulan umum atas capaian kinerja sebagai berikut :

1. Secara umum semua program/kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran yaitu pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Total alokasi anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022 adalah sebesar Rp. 83.266.722.708,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 4.798.730.426,-, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 5.729.743.865,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 72.738.248.170,- Dari total alokasi tersebut, realisasi anggaran adalah sebesar Rp.75.823.683.453,- atau 91,06%. Penyerapan anggaran yang belum maksimal ini disebabkan karena masih ada paket pekerjaan-pekerjaan belanja modal dan belanja barang jasa yang belum selesai 100% sampai dengan akhir tahun anggaran.
3. Secara umum keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan oleh kelalaian pelaksana (kontraktor) yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
4. Faktor lain juga yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah waktu dimulainya proses pengadaan barang dan jasa yang sedikit terlambat, sehingga hampir semua pekerjaan baru dimulai pada bulan juli tahun anggaran 2022.
5. Belum diselesaikannya beberapa paket pekerjaan ini mengakibatkan pencapaian kinerja terhadap target dari sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan belum dapat dicapai dengan maksimal sesuai target yang telah direncanakan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Malaka



Yohanes Nahak, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19661231 200012 1 036